

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Sumber Lain

- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak) Implementation of Field Studies To Improve Problem Analysis Ability (Case Study in the Student Sociology Iisip Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63–72.
- Aripradana, W. M., & Wibowo, P. (2021). Pengelolaan Anggaran pada Masa Pandemi Covid-19 di KPPBC TMP A Marunda dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnalku*, 1(2), 124–140.
- Arismunandar, S. (2013). Teknik Wawancara Jurnalistik. *Academia*, 4, 1–9.
- Atmodjo, S. Y. P., & Akhmadi, M. H. (2021). Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya II. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 144–166.
- Azmi, S. A., & Jusmani. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 14(2), 43–55. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/1304>
- Dyas, B. P., & Fararisti, R. I. (2020). Studi Dokumen dalam Metodologi Penelitian Kualitatif. *Academia*, 1901328580.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hesda, A. R. (2017). *Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah*. Direktorat Jenderal Keuangan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>
- Kurniawan, A. (2021). *Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?* Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/06/24/111700226/tren-belanja-online-selama-pandemi-barang-apa-yang-banyak-dibeli-masyarakat->

- Panjaitan, R. P. (2021). Mengenal APBN. In *APBN 101 Mengenal APBN Untuk Pemula* (pp. 15–22). Penerbitan PKN STAN.
- Pratama, A. A. (2021). *Realitas Menarik Kebijakan Work from Home (WFH) di Masa Pandemi*. BBPPKS Makassar.  
<https://bbppksmakassar.kemensos.go.id/Berita/topic/96>
- Ramadani, D., & Herdi. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling dalam Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Edukasi*, 6(1), 58–73.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Kinerja*, 15(1), 38.  
<https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>
- Sartika, I., & Wibowo, P. (2021). Penyajian Dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Jurnal Akuntansi Unihaz -Jaz*, 4(1), 78–93.
- Savitri, R. B. C. (2021). *Tinjauan atas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Selama Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 1 (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, (2020).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 22698 (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 66 37 (2012).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, (2016).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, 150 (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, (2018).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keua, 1 (2020).

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (2020).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kkp.Go.Id 1 (2020).

<https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/19901-surat-edaran-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-58-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-pegawai-aparatur-sipil-negara-dalam-tatanan-normal-baru>

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, (2020).

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 Tanggal 9 April 2020 Hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat Covid-19, (2020).

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 Tanggal 27 April 2020 Hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), (2020).

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1200/AG/2020 Tanggal 19 Juli Hal Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tata Normal Baru

Nota Dinas Nomor ND-2862/PB.1/2020 Hal Penyesuaian Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA dalam Pelaksanaan Tata Normal Baru serta Pemberian Biaya Paket Data dan Komunikasi, 4 (2020).

Lampiran I Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-496/PB.2/2020 Tanggal 29 Mei 2020 Hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Keadaan Darurat Covid-19, (2020).